

Respon Tiongkok dan Korea Selatan terhadap Uji Coba Nuklir yang Korea Utara Tahun 2017

Dewi Kania Saraswati
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
dewikaniasaraswati17@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini menganalisis respons Tiongkok dan Korea Selatan terhadap uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan konsep keamanan regional. Melalui pendekatan keamanan regional, penelitian ini mengidentifikasi dampak apa yang dirasakan Korea Selatan dan Tiongkok sehingga mengeluarkan respons. Tiongkok, sebagai mitra strategis Korea Utara, dihadapkan pada dilema keamanan yang melibatkan keseimbangan antara mendukung rezim Korea Utara dan menjaga stabilitas regional. Sementara itu, Korea Selatan dihadapkan pada tantangan keamanan yang mengharuskannya merespon dengan cermat terhadap ancaman nuklir tetangganya sambil mempertahankan keseimbangan regional.

Kata Kunci : *Korea Utara, Tiongkok, Keamanan Regional, Uji Coba Nuklir, Korea Selatan.*

ABSTRACT

The journal analyzed the response of China and South Korea to a nuclear test conducted by North Korea in 2017 by considering regional security concepts. Through a regional security approach, this study identified what impact South Korea and China had, thus issuing a response. China, as North Korea's strategic partner, is faced with a security dilemma involving a balance between supporting the North Korean regime and maintaining regional stability. Meanwhile, South Korea is faced with security challenges that require it to respond carefully to its neighbors' nuclear threats while maintaining regional balance.

Keywords : *North Korea, Tiongkok, Regional Security, Nuclear Test, South Korea.*

PENDAHULUAN

Uji coba nuklir mulai dilakukan lagi oleh Korea Utara tepatnya kelima kalinya pada tanggal 3 September tahun 2017. Korea Utara telah menembakkan rudal balistik jarak menengah ke perairan Jepang di kawasan Pasifik. Rudal ini dilaporkan dapat mencapai jarak sekitar 3.700 kilometer yang mana membuat wilayah pangkalan militer Amerika Serikat di Guam berada di jangkauan senjata Korea Utara (Syahrin, 2018). Dengan kemajuan ini menciptakan kekhawatiran mendalam di kalangan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Terutama, ketidakstabilan regional di Asia Timur semakin memuncak, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat merespons dengan keprihatinan yang mendalam atas potensi ancaman keamanan.

Upaya diplomatik ditunjukkan melalui resolusi PBB dengan memberlakukan sanksi ekonomi sebagai langkah untuk menekan Korea Utara agar memberhentikan uji cobanya.

Tetapi tidak digubris oleh Korea Utara dan tetap melakukan uji coba nuklir. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara menunjukkan tindakan nyata dalam mengekspresikan penolakan larangan agar berhenti melakukan uji coba nuklir, serta keberlanjutan program nuklir juga pengabaian terhadap sanksi yang diberlakukan oleh PBB (R, 2021). Pengembangan program nuklirnya dimaksudkan untuk memperkuat keamanan dan menggapi adanya campir tangan AS di Korea Selatan.

Dinamika hubungan internasional pun ikut terpengaruh, memengaruhi relasi Korea Utara dengan negara-negara besar seperti Tiongkok , sementara Amerika Serikat bersama sekutunya berusaha merumuskan respons bersama untuk mengatasi ancaman ini. Dalam konteks ini, uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2017 menciptakan eskalasi ketegangan yang mendesak komunitas internasional untuk mencari solusi yang efektif terhadap tantangan keamanan yang dihadapi. Rumusan Masalah dalam Jurnal ini yaitu "Bagaimana respon Tiongkok dan PBB terhadap uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ditahun 2017"

KERANGKA TEORI

Security Regional Complex

Menurut Barry Buzan, kompleks keamanan regional merupakan teori komprehensif memungkinkan suatu negara untuk menganalisis dan membenarkan pertumbuhannya sendiri dalam suatu wilayah tertentu. Kompleks keamanan regional muncul sebagai sebuah konsep baru dalam arsitektur keamanan internasional, sebagai sebuah dimensi yang menghubungkan pola kehidupan antar negara dalam kehidupan internasional sebelum, pada saat, dan setelah Perang Dingin. Kompleksnya keamanan regional menawarkan pandangan yang berbeda dan beragam namun pengaruhnya sangat teoritis (Barry Buzan, 2003).

Dalam konteks kompleksitas keamanan regional, isu-isu keamanan yang melibatkan negara-negara terkait saling terkait, dan keamanan nasional tidak dapat diisolasi tanpa mempertimbangkan kondisi keamanan di tingkat regional. Meskipun ada tingkat ketergantungan di antara negara-negara dalam suatu wilayah, hal itu tidak menjamin tercapainya situasi yang harmonis. Terwujudnya keseimbangan yang harmonis dalam hubungan antar negara dalam suatu kawasan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti campur tangan kekuatan eksternal di dalam negara-negara dan wilayahnya.

Uji coba nuklir memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas keamanan regional dengan meningkatkan ketegangan dan kekhawatiran di kawasan Asia Timur. Tindakan uji coba nuklir tersebut mencerminkan kemampuan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam stabilitas keamanan baik di tingkat regional maupun global. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, serta menimbulkan respons dari negara-negara lain di kawasan, termasuk Tiongkok dan Rusia. Di samping itu, uji coba nuklir juga berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan tersebut, yang dapat meningkatkan ketegangan dan mengancam stabilitas keamanan regional.

Tanggapan dari Tiongkok dan Korea Selatan memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah tersebut karena kedua negara tersebut memiliki peran krusial dalam upaya denuklirisasi Korea Utara. Tiongkok, sebagai mitra utama Korea Utara, memiliki pengaruh yang besar dalam proses denuklirisasi, sementara Korea Selatan, sebagai negara tetangga Korea Utara, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas di wilayah Asia Timur. Respons dari Tiongkok dan Korea Selatan memiliki potensi untuk memengaruhi sikap Korea Utara dalam proses denuklirisasi dan juga dapat memengaruhi arah kebijakan internasional terkait Korea Utara. Selain itu, reaksi dari Tiongkok dan Korea Selatan juga dapat berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dengan Korea Utara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas wilayah regional.

METODE PENELITIAN

Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori sebagai bahan pendukung analisis, permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini kemudian ditulis menjadi narasi berdasarkan hasil pengumpulan data. Metode penelitian data yang digunakan yaitu studi literatur dengan berbagai sumber, seperti buku, website, jurnal, dan media online lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data itu sendiri, seperti dari sumber yang tidak langsung ke lapangan melainkan data skunder yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang respon Tiongkok dan PBB dalam uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara tahun 2017.

PEMBAHASAN**1. Uji Coba Nuklir Korea Utara tahun 2017**

Hwasong-14 pertama kali terlihat pada 4 Juli 2017, saat Korea Utara melakukan uji coba perdana rudal tersebut. Pada 28 Juli 2017, Hwasong-14 diluncurkan kembali. Selama uji coba ini, rudal mencapai ketinggian 3.700 kilometer dan menempuh sekitar 1.000 km dalam waktu 47 menit. Para ahli meyakini bahwa Hwasong-14 memiliki jangkauan lebih dari 10.000 kilometer jika diterbangkan dalam lintasan balistik yang memaksimalkan jangkauan, berdasarkan uji coba yang dilakukan pada 28 Juli 2017. Hidung Hwasong-15 kurang tumpul dan lebih tipis dibandingkan dengan Hwasong-14. Hidung ini memberikan potensi pada Hwasong-15 untuk memiliki hulu ledak ganda yang sangat kuat. Hulu ledak ganda ini adalah misil dengan dua peluru, yang mampu menggunakan bahan bakar cair (Munadi, 2018).

Hwasong-15 diuji coba pada 29 November 2017, dengan jarak sekitar 960 kilometer, mencapai ketinggian 4.500 km, dan terbang selama sekitar 54 menit. Bisa mencapai 13.000 kilometer jika melewati jarak yang disarankan. Karena dibutuhkan penggunaan Rudal Balistik Antarbenua (ICBM), yang dapat melakukan perjalanan antarbenua, ini merupakan terobosan yang patut diperhatikan. Pada 3 September 2017, uji coba nuklir keenam dikatakan telah melibatkan penempatan sukses bom hidrogen di atas ICBM. Mengingat ledakan tahun 2017 adalah yang terbesar sepanjang masa, kekuatannya lima kali lebih kuat daripada uji coba sebelumnya (Adam, 2023). Uji coba nuklir ini menyebabkan Gempa Bumi.

Uji coba ini merupakan yang keenam dan paling kuat yang dilakukan oleh Korea Utara saat itu, terjadi pada bulan September 2017. ledakannya setara dengan 160 kiloton, dan ledakan ini menciptakan guncangan awal dengan magnitudo 6.3, menyebabkan serangkaian gempa susulan dan laporan tentang runtuhnya bangunan. Gempa yang melanda Korea Utara pada tanggal 2 Januari 2019, dengan magnitudo 2.8, dikaitkan dengan uji coba nuklir ini, dan dampaknya dirasakan setidaknya hingga tahun 2019. Aktivitas seismik di dekat situs uji coba nuklir Punggye-ri terus berlanjut dalam beberapa tahun berikutnya, menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas geologis di daerah tersebut (Liza Lester, 2019).

Kekhawatiran Tiongkok terhadap penyebaran senjata nuklir oleh Korea Utara melibatkan potensi efek domino, memungkinkan Jepang pembangunan nuklir dan akan

memicu aksi militer dari AS atau negara lain (Hughes, 2007). Ancaman potensial dari penyebaran nuklir oleh Korea Utara adalah kemungkinan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Taiwan merasa perlu memiliki senjata nuklir, memicu perlombaan senjata atau pengembangan persenjataan di Asia Timur.

Warga Tiongkok yang tinggal di sekitar perbatasan dengan Korea Utara mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan Korea Utara melakukan uji coba nuklir tanpa pemberitahuan. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi penyebaran kontaminasi radioaktif. Meskipun demikian, ada juga keprihatinan yang melampaui aspek kontaminasi radioaktif, yaitu kemungkinan bahwa uji coba nuklir dapat memicu letusan Gunung Api Baekdu. Penduduk Korea Utara meyakini bahwa Gunung Baekdu adalah tempat kelahiran Kim Jong Il (Julio, 2017). Kekhawatiran ini dapat dipahami mengingat Yanji hanya berjarak enam mil (9,6 kilometer) dari perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Sebagai tambahan informasi, fasilitas pengembangan nuklir Punggye-ri Korea Utara terletak 60 mil (96 kilometer) dari perbatasan tersebut.

Mengingat kedua negara secara geografis bersebelahan dan kedua negara tersebut mempunyai sejarah yang panjang, terutama dalam hubungan dengan Korea Selatan, maka perluasan program nuklir Korea Utara atau percobaan ledakan nuklir tentu akan berdampak pada Korea Selatan (Chang-II, 2010). Dilihat dari sudut pandang sejarah sederhana, perbedaan politik dan ideologi menjadi salah satu penyebab pecahnya perang.

Oleh sebab itu, situasi kedua negara saat ini masih menghadapi tantangan keamanan, seiring dengan bertambahnya persenjataan nuklir Korea Utara, sehingga menimbulkan dilema keamanan bagi negara tetangga, 2017 mengalami peningkatan ketegangan di sekitar senjata nuklir Korea Utara, terutama dengan upaya ledakan nuklir pada 6 September 2017. Peristiwa ini mengancam keamanan Korea Selatan sehingga mengakibatkan senjata nuklir Korea Selatan kembali menjadi isu yang dibicarakan secara terbuka di media Korea Selatan.

2. Respon Negara Tiongkok

PBB mengeluarkan resolusi ditahun 2017 untuk Korea Utara yaitu Resolusi 2375 (11 September 2017) mengutuk uji nuklir pada 2 September 2017 dan memperpanjang larangan peluncuran nuklir. Negara anggota PBB dilarang menyediakan atau mengalihkan cairan kondensat dan gas alam ke Korea Utara. Korea Utara dilarang memasok atau menjual barang tekstil, dan pembatasan ditempatkan pada transportasi, penjualan, dan pengalihan produk

minyak murni. Larangan lain termasuk larangan usaha kolaboratif dengan bisnis atau orang Korea Utara dan larangan memberikan izin kerja kepada warga Korea Utara di dalam otoritas negara anggota. Resolusi ini sangat menekankan pada hak asasi manusia dan menempatkan aset membeku pada organisasi dan orang-orang yang terlibat dalam peluncuran nuklir (R, 2021).

Dalam rangka menjalankan sanksi, Amerika Serikat membutuhkan dukungan Tiongkok dan menekannya untuk komitmen terhadap denuklirisasi Korea Utara. Tiongkok berperan penting dalam kebijakan sanksi ekonomi PBB terhadap Korea Utara, dipengaruhi oleh tekanan Amerika Serikat dan ancaman dari program nuklir Korea Utara. Tiongkok pun setuju untuk bekerja sama dengan Amerika dalam menangani masalah nuklir Korea Utara, mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara melalui penyesuaian responsnya. Dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB terkait Resolusi 2270, Tiongkok bersama seluruh anggota DK PBB secara bulat menyetujui langkah penting sebagai respons terhadap uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara (Ruhmiyati & Indrawati, 2018)

Tiongkok masih diizinkan oleh resolusi PBB untuk mengirim hingga 2 juta barel minyak mentah ke Korea Utara setiap tahun. Jika dibandingkan dengan impor minyak mentah Korea Utara dari Tiongkok pada tahun 2016, yang mencapai 6.000 barel per hari atau sekitar 2,2 juta barel per tahun, angka ini secara substansial telah menurun (Renny Miryati, 2020).

Harga bahan bakar minyak (BBM) Pyongyang mengalami kenaikan akibat pembatasan tersebut. Harga gas di kota itu naik 45,1% sejak 13 September menjadi USD2,51 per kilogram (kg), atau sekira Rp33.230, dari USD1,73 per kg atau sekira Rp22.900, pada harga sebelumnya. Lebih lanjut, harga BBM di Korea Utara mengalami lonjakan yang cukup signifikan, naik 61,5% menjadi USD2,10 per kg atau sekira Rp27.800, dari harga awal USD1,30 atau sekitar Rp17.210 per kilogram (Viranka, 2017).

Korea Utara juga akan terkena dampak negatif oleh larangan PBB terhadap ekspor tekstil. Ekspor terpenting kedua untuk Pyongyang adalah tekstil, yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp9,3 triliun (sekitar USD700 juta) dalam pendapatan yang hilang setiap tahun (Dewi, 2017).

3. Respon Korea Selatan

Wilayah terlalu dekat dengan Korea Utara berpotensi berdampak dan membahayakan keamanan Korea Selatan dari program nuklir Korea Utara. Karena itu, setiap langkah yang dicapai Korea Utara, terutama dalam hal persenjataan dan militer, bisa mempengaruhi respon Korea Selatan terhadap Korea Utara (WICAHYANI, 2010).

Dalam pidatonya kepada Majelis Nasional pada 1 November 2017, Moon Jae-in, berjanji bahwa negaranya tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan menahan nuklir. Namun, pendapat mereka tentang kapal selam nuklir menyimpang. Saat mencalonkan diri sebagai presiden. Moon menyatakan bahwa ia mendukung penggunaan tenaga nuklir dalam kapal dan bahwa ia akan mendekati Amerika Serikat untuk meminta bantuan. Selain itu, Korea Selatan mulai menyelidiki kelayakan pembuatan kapal selam nuklir. Angkatan Laut Korea Selatan telah melibatkan sebuah organisasi swasta untuk membantu mereka menghindari larangan global dalam produksi kapal selam nuklir.

Pada 8 November 2017 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bilateral yang diadakan di Seoul, Moon dan Trump berbicara tentang keinginan Moon menggunakan kapal selam nuklir untuk mempertahankan diri terhadap rudal. Kedua presiden memutuskan untuk mulai berbicara tentang mengakuisisi dan mengerahkan kapal bertenaga nuklir Korea Selatan (Campbell, 2021). Sebagai tanggapan, Korea Selatan mulai mengerjakan sistem anti-misil dengan Amerika Serikat. Korea Utara marah dengan diperkenalkannya THAAD, atau *Terminal High Altitude Area Defense* dan membalasnya dengan uji coba nuklir pada 2017. Pertahanan Udara dan Rudal Korea Selatan digunakan untuk meluncurkan rudal jarak dekat di darat serta Peningkatan latihan anti-misil

KESIMPULAN

Uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2017, khususnya Hwasong-14 dan Hwasong-15, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan kemampuan nuklirnya. Uji coba keenam pada bulan September 2017, yang melibatkan bom hidrogen yang ditempatkan pada ICBM, merupakan ledakan terbesar dalam sejarah uji coba nuklir Korea Utara. Dampak dari uji coba ini tidak hanya menciptakan gempa bumi dan kekhawatiran terhadap stabilitas geologis di sekitar situs uji coba, tetapi juga menciptakan ketegangan dan kekhawatiran keamanan di tingkat regional, terutama di Tiongkok dan Korea Selatan. Tiongkok, sebagai sekutu dekat Korea Utara, merespons dengan memberlakukan sanksi dagang terhadap Korea

Utara, termasuk pembatasan pasokan gas alam cair dan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta penghentian impor tekstil.

Sebagai tetangga yang langsung terkena uji coba nuklir Korea Utara, Korea Selatan bertanggung jawab dengan meningkatkan kewaspadaan dan menegaskan kembali penentangan terhadap Semenanjung Korea. Presiden Moon Jae-In menyatakan bahwa Korea Selatan didedikasikan untuk mengembangkan senjata nuklir dan tidak akan membangun salah satu dari mereka. Untuk mempertahankan diri dari ancaman rudal balistik Korea Utara, Korea Selatan melakukan penilaian kelayakan untuk pembangunan kapal bertenaga nuklir dan peluncur anti misil THAAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. (2023). Analisis Strategi Nuklir Korea Utara Pasca Perang Dingin : Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Timur. *Jayapangus Press Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume 6 Nomor 3*, 584.
- Barry Buzan, O. W. (2003). *Regions and Powers the Structure of International Security*. Oxford: Cambridge University Press.
- Campbell, J. (2021). Seoul's Misguided Desire For a Nuclear Submarine. *Nawar War Collage Review Volume 74 Number 4*, 1.
- Chang-II, O. (2010). The Causes of the Korean War, 1950-1953. *International Journal of Korean Studies · Vol. XIV, No. 2* , 20.
- Dewi, C. (2017, September 25). *China Batasi Ekspor Minyak ke Korut dan Hentikan Impor Tekstil*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/amp/3106564/china-batasi-ekspor-minyak-ke-korut-dan-hentikan-impor-tekstil>
- Farhan, L. (2018). Kerjasama Militer korea Selatan dan Amerika Serikat dalam penempatan THAAD sebagai respon atas Uji Coba Misil Balistik Korea Utara Periode 2013-2017. *Balcony Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy Vol. 2 No. 2*, 111.
- Hughes, C. W. (2007). North Korea's Nuclear Weapons : Implications for the nuclear ambitions of Japan, South Korea and Taiwan. *Asia Policy Number 3*, 75.
- Julio, E. (2017, April 26). *Warga China yang Tinggal Dekat Perbatasan Korut Khawatir dengan Uji Coba Nuklir*. Retrieved from OKENEWS: <https://news.okezone.com/read/2017/04/26/18/1676396/warga-china-yang-tinggal-dekat-perbatasan-korut-khawatir-dengan-uji-coba-nuklir>
- Liza Lester, A. (2019, June 03). *2017 North Korean nuclear test was order of magnitude larger than previous tests*. Retrieved from UC SANTA CRUZ: <https://news.ucsc.edu/2019/06/nuclear-test.html>
- Munadi, H. (2018). MISI UJI COBA PELUNCURAN SENJATA NUKLIR KIM JONG UN. *SKRIPSI FISIF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA* , 35.

- R, N. &. (2021). Implikasi Hukum ketidakpatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir . *Journal of International Law Vol. 2 No.1*, 18.
- Renny Miriyati, G. T. (2020). Perubahan Respon Tiongkok Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara (2013-2018). *Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No 2*, 203.
- Ruhmiyati, & Indrawati. (2018). Perubahan Sikap Tiongkok atas Resolusi DK PBB 2270 tentang Nuklir Korea Utara Tahun 2016. *JURNAL TRANSBORDERS*, 44-66.
- Syahrin, M. N. (2018). LOGIKA DILEMA KEAMANAN ASIA TIMUR DAN RASIONALITAS PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA. *Intermestic : Journal of International Studies Volume 2, No.2, Mei*, 120.
- Viranka, D. (2017, September 25). *Dukung Sanksi PBB, China Batasi Ekspor Minyak Bumi ke Korut Mulai 1 Oktober*. Retrieved from OKENEWS: <https://news.okezone.com/read/2017/09/25/18/1782472/dukung-sanksi-pbb-china-batasi-ekspor-minyak-bumi-ke-korut-mulai-1-oktober>
- WICAHYANI, A. F. (2010). DAMPAK PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA . *TESIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA*, 68.